

## PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

**Lasarus Lasa, Kaja**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kapuas Sintang

Jl. JC.Oevang Oeray Sintang Kalimantan Barat

*Email : kajaunka@gmail.com*

**Abstrak :** Partisipasi masyarakat merupakan modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan desa, bentuk partisipasi yang dilaksanakan adalah bentuk swadaya dan gotong-royong atau partisipasi dalam bentuk tenaga sedangkan partisipasi dalam bentuk ide-ide atau pikiran belum maksimal sehingga Kepala Desa dan perangkatnya wajib memberikan motivasi pada masyarakat. Selanjutnya dalam perencanaan pembangunan Kepala Desa melibatkan perangkat desa dan masyarakat, akan tetapi partisipasi dalam bentuk perencanaan dilakukan musyawarah desa masyarakat menyampaikan pendapat atau ide lebih cenderung menyetujui perencanaan yang dilakukan oleh Kepala Desa, sedangkan tahap-tahap partisipasi dilakukan sejak perencanaan sampai pemeliharaan hasil-hasil pembangunan, walaupun tidak semua masyarakat dapat berpartisipasi sepenuhnya. Pendorong partisipasi adalah keinginan dan kesadaran masyarakat yang ingin berubah ke arah yang lebih baik dari sebelumnya, sementara penghambat partisipasi kurangnya kesadaran dan tingkat pemahaman tentang pentingnya partisipasi.

**Kata Kunci:** Partisipasi, Perencanaan, Pembangunan Desa

Pembangunan Desa merupakan salah satu pembangunan yang tidak terlepas dari pembangunan nasional, oleh karena itu pembangunan desa wajib di dukung oleh seluruh lapisan masyarakat, mengingat bahwa penduduk Indonesia sebagian besar berdomisili di pedesaan, oleh karena itu kegagalan dalam pelaksanaan pembangunan desa berdampak pada pembangunan nasional. Disatu sisi pembangunan desa merupakan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat sehingga penyelenggaraan pembangunan desa modal dasarnya adalah swadaya masyarakat serta partisipasi masyarakat. Namun pada sisi lain pembangunan desa menghadapi berbagai kendala terutama dari segi sumber daya manusia yang belum memadai dalam pengelolaan anggaran maupun peralatan sebagai pendukung pembangunan.

Anggaran yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan pembangunan masih terbatas, baik untuk pelaksanaan pembangunan secara fisik maupun non fisik. Jadi selama ini pelaksanaan pembangunan desa hanya bersumber dari alokasi dana desa (ADD) sementara pendapatan asli desa (PADes) masih sangat minim.

Sejalan dengan hal tersebut maka subsidi desa yang dianggarkan oleh pemerintah sebenarnya hanya untuk memancing swadaya gotong-royong masyarakat, sehingga tidak berlebihan kalau dikatakan keterlibatan masyarakat menjadi penopang secara langsung maupun tidak langsung menuju pada perubahan yang lebih baik, oleh karena itu masyarakat harus bertekad dengan sungguh-sungguh melakukan perubahan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Dengan demikian konsep perencanaan pembangunan *top down button up planning* untuk mengetahui kebutuhan masyarakat desa, sehingga perencanaan yang dominan adalah di rencanakan masyarakat itu sendiri sedangkan perencanaan dari atas (Pemerintah Kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten) melakukan penganggaran dalam rangka mendukung pembangunan desa sesuai dengan alokasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun demikian pembangunan cenderung perencanaan dari atas akibatnya tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa, dalam arti bahwa perencanaan yang dilakukan di desa melalui musyawarah rencana koordinasi pembangunan desa (rakorbangdes) tetapi dalam

pelaksanaan tidak sesuai dengan hasil musyawarah di tingkat desa maupun Kecamatan. Dengan demikian maka perencanaan yang dilakukan masyarakat desa cenderung tidak sesuai dengan pelaksanaan, akibatnya hasil-hasil pembangunan tidak menyentuh kebutuhan masyarakat. Sejalan dengan kendala pelaksanaan pembangunan desa yang telah diuraikan tersebut di atas, salah satu persoalan mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam proses penyelenggaraan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah adalah bagaimana membangun atau menciptakan mekanisme pemerintahan yang dapat mengemban misinya untuk mewujudkan pemerintahan yang dapat mensejahterakan masyarakat secara berkeadilan. Dengan demikian, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut, pemerintah harus melaksanakan pembangunan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah sehingga memasuki era reformasi pengalokasian anggaran dituntut adanya keseimbangan antara keuangan pusat dan daerah harapannya adalah agar pembangunan dapat merata diseluruh tanah air, namun kenyataannya masih terdapat kepincangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bahkan Pemerintahan daerah Propinsi, Kabupaten dan sampai pada desa-desa memiliki perbedaan yang signifikan, oleh karena itu pemerataan pembangunan belum dapat dilaksanakan dengan baik.

Bertitik tolak dari apa yang telah dipaparkan di atas, maka terdapat dua hal yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, pertama : perlu menampung aspirasi masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat, sebab aspirasi masyarakat merupakan aspirasi hati nurani masyarakat bukan politik masyarakat, pemerintah harus responsif terhadap aspirasi rakyatnya. Kedua pemerintah melibatkan masyarakat dan menggali potensi masyarakat untuk kemajuan masyarakat itu sendiri, sebab pemerintah yang kuat didukung oleh masyarakat yang kuat dengan menggunakan ide-ide dan segenap kemampuannya untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Dengan kata lain pemerintah perlu menempatkan rakyat sebagai

subjek pembangunan, bukan hanya sebagai objek pembangunan. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan masyarakat sangat bergantung kepada peranan pemerintah dan masyarakatnya, keduanya harus mampu menciptakan sinergi, namun demikian pembangunan akan berhasil dengan baik harus didukung melalui tiga dimensi yaitu Pemerintah, masyarakat dan swasta. Tanpa melibatkan masyarakat, pemerintah dan swasta sulit untuk dapat mencapai hasil pembangunan secara optimal.

Selain memerlukan keterlibatan masyarakat, pembangunan juga membutuhkan strategi yang tepat agar dapat lebih efisien dari segi pembiayaan dan efektif dari segi hasil. Dengan cara ini pemerintah makin mampu menyerap aspirasi masyarakat banyak, sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat memberdayakan dan memenuhi kebutuhan rakyat banyak. Secara umum bahwa pembangunan merupakan suatu proses perubahan menuju kepada perubahan yang lebih baik. Namun untuk mencapai pada perubahan yang lebih baik mengalami kendala dan tantangan meliputi segala segi kehidupan politik, ekonomi dan sosial budaya. Tantangan ini harus disikapi secara bersama-sama tidak terkecuali peran serta masyarakat, kegiatan melibatkan partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat merupakan strategi menuju pada proses pembaharuan.

Namun demikian bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa masih kurang terutama dari segi partisipasi dalam bentuk dana dan ide-ide, selain itu masyarakat beranggapan bahwa alokasi dana desa cukup untuk melaksanakan pembangunan desa, selain itu kecendrungan masyarakat dewasa ini kurang responsif dan cenderung menuntut pada pemerintah, padahal pembangunan desa harus dapat mengoptimalkan kemampuan dan berperan penting sebagai fundamental kemajuan masyarakat bangsa dan negara, oleh karena itu pemerintah desa harus dapat berkomunikasi dengan masyarakat serta memberikan motivasi pada masyarakat untuk terlibat dalam pelaksanaan pembangunan desa. Selanjutnya sebagaimana telah dipaparkan di atas, masyarakat perlu adanya

motivasi dari pemerintah, pemerintah desa, pemerintah kecamatan bahkan pemerintah kabupaten, sebab tidak dapat dimungkiri bahwa tanpa keterlibatan masyarakat maka akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaan pembangunan. Sejalan dengan hal tersebut pertanyaan yang dapat diajukan adalah, bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa?

Kata partisipasi adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa Inggris yakni *participation* selanjutnya jika di definisikan menurut bahasa Indonesia partisipasi mengandung suatu pengertian ikut serta mengambil bagian, tentu saja dalam hal ini perlu disesuaikan dengan kemampuan individu agar cita-cita bersama dapat terlaksanakan sesuai dengan harapan. Untuk melaksanakan pembangunan di pedesaan perlu partisipasi aktif dari seluruh masyarakat, karena masyarakat lebih mengetahui tentang potensi yang ada dan segala yang ada yang menjadi prioritas utama di desa. Dalam konsep pembangunan desa partisipasi dapat juga diartikan adanya keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan sejak perencanaan sampai proses pengawasan serta menikmati hasil pembangunan.

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan maka warga masyarakat perlu diberikan motivasi sehingga masyarakat tertarik dan ikut serta dalam usaha pembangunan desa, oleh karena itu motivasi sangat diperlukan sebagai usaha meningkatkan partisipasi masyarakat sebab tanpa adanya keterlibatan masyarakat sulit untuk melaksanakan pembangunan serta menuju perubahan yang lebih baik dari sebelumnya. Davis (2000 : 142) menjelaskan bahwa, "partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional seseorang atau individu dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk berkontribusi terhadap tujuan kelompok dan mempertanggung jawabkan keterlibatannya." Dari pendapat tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa inti dari partisipasi adalah usaha yang terorganisir dari masyarakat untuk berperan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Untuk itu dalam partisipasi

masyarakat seharusnya tidak hanya menerima dan menikmati, melainkan juga bertanggungjawab untuk memelihara hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai. Echols dan Shadily (dalam Soetrisno, 2000 : 419) menjelaskan bahwa, "Pengertian partisipasi adalah suatu kegiatan untuk membangkitkan perasaan dan diikuti sertakan atau ambil bagian dalam kegiatan suatu organisasi." Dengan demikian, bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dapat dilihat sampai sejauh keikutsertaan masyarakat terhadap pembangunan tersebut, mulai dari sejak perencanaan sampai dengan terwujudnya tujuan dari pembangunan baik secara aktif maupun secara pasif. Berdasarkan hal tersebut bahwa partisipasi masyarakat menjadi modal untuk pelaksanaan pembangunan, dengan adanya partisipasi rasa memiliki terhadap pembangunan itu ada serta ikut memeliharanya dengan baik.

Sumardi (2005 : 46) mengatakan bahwa, "Arti partisipasi adalah peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan seperti : pikiran, tenaga, keahlian (*skill*), modal (materi), ikut memanfaatkan dan menikmati hasil - hasil pembangunan." Berdasarkan pernyataan di atas bahwa pembangunan desa harus dapat melaksanakan pemberdayaan serta meningkatkan keterampilan masyarakat, dengan demikian pelaksanaan pembangunan didukung oleh adanya keterampilan masyarakat sehingga dapat menolong dirinya sendiri dan dapat memperluas bidang usaha menuju masyarakat yang sejahtera adil dan makmur. Senada dengan uraian tersebut pembangunan yang dilaksanakan harus dapat menyentuh sendi-sendi kehidupan masyarakat terutama masyarakat pedesaan, dengan adanya pembangunan yang menyentuh kehidupan masyarakat khususnya masyarakat desa sehingga dapat menimbulkan minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Berbagai terobosan yang dilakukan pemerintah untuk membangun masyarakatnya tetapi masih berkisar pada kesejahteraan masyarakat serta memantapkan roda ekonomi

masyarakat, walau sampai saat ini tingkat kesejahteraan masyarakat masih jauh dari harapan, tetapi usaha menuju ke arah tersebut terbuka lebar melalui berbagai program, tetapi untuk mencapainya tidak sedikit tantangan yang harus di hadapi, seolah-olah sampai saat ini pemerintah, masyarakat dan swasta tidak berdaya menghadapi tantangan untuk mencapai kesejahteraan terutama sejak bangsa Indonesia dan dunia mengalami kasus covid-19 sehingga orientasi bukan lagi pada sektor ekonomi tetapi fokus pada faktor kesehatan. Dengan demikian, tantangan yang terjadi saat ini memiliki dampak yang cukup besar bagi bangsa Indonesia terutama perekonomian bangsa Indonesia menjadi tidak stabil, yang pada akhirnya meningkatnya jumlah pengangguran, kemudian terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK). Masalah tersebut tidak mungkin dapat di atasi kalau hanya mengandal satu pihak yaitu pemerintah tetapi harus di dukung oleh masyarakat dan swasta disinilah pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan desa.

Sejalan dengan uraian tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa inti dari partisipasi adalah usaha yang terorganisir dari masyarakat untuk berperan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Untuk itu dalam partisipasi masyarakat seharusnya tidak hanya menerima dan menikmati, melainkan juga bertanggungjawab untuk memelihara hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai. Agar berbagai program pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan mencapai hasil yang diharapkan maka diperlukan adanya partisipasi masyarakat secara aktif sejak perencanaan pembangunan sampai pada pemeliharaan hasil pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, terutama berkaitan dengan aspek keadilan dan pemerataan pembangunan. Penjelasan pada pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa dijelaskan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta

pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Menurut Isbandi (2007 : 26) bahwa, "Partisipasi adalah ikut sertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi." Jadi dengan demikian partisipasi biasanya berkaitan keikutsertaan atau partisipasi dikaitkan dengan keterlibatan masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan dengan arah yang ingin dicapai telah ditentukan terlebih dahulu.

Sejalan dengan pendapat tersebut diatas maka dapat dikatakan bahwa partisipasi adalah keikutsertaan secara aktif oleh masyarakat dalam menentukan arah pembangunan, oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam rencana pembangunan harus sudah dimulai sejak saat perencanaan kemudian pelaksanaan dan seterusnya pemeliharaan diikuti dengan tanggung jawab, yang bertujuan untuk kepentingan bersama. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program merupakan lanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, maupun tujuan. Di dalam pelaksanaan program, sangat dibutuhkan keterlibatan berbagai unsur, khususnya pemerintah dalam kedudukannya sebagai fokus atau sumber utama pembangunan. Sejalan dengan pendapat diatas, maka dapat dikatakan partisipasi adalah keikutsertaan secara aktif oleh masyarakat dalam menentukan arah pembangunan yang diikuti dengan rasa tanggung jawab. Oleh sebab itu dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat, pemerintah sebagai agen pembangunan mempunyai peran sangat penting.

Berdasarkan pendapat ahli tersebut di atas bahwa partisipasi dalam masyarakat adalah partisipasi dalam perencanaan pembangunan, partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi ikut memelihara pembangunan dan partisipasi dalam menikmati hasil pembangunan, oleh karena itu partisipasi masyarakat adalah untuk kepentingan bersama dan sama-sama bertanggung jawab atas pemeliharaan pembangunan mengingat

bahwa pembangunan tersebut dimiliki dan dinikmati bersama oleh warga masyarakat. Perencanaan Pembangunan yang diterapkan di Negara berkembang selama ini adalah *top down strategy*. Selain itu juga diterapkan *top down planning* dan *bottom up planning*, namun demikian *top down strategy* sebagaimana dikemukakan oleh Ndraha (2007:127) bahwa, “pada awal proses pembangunan memang pola itu membawa manfaat, tetapi tatkala pola itu mengacu pada asisten, timbullah masalah. Masyarakat terbiasa untuk bergantung pada pemerintah dan kemampuannya untuk berkembang secara mandiri sukar dikembangkan. Untuk mengantisipasi berbagai akses negative yang ditimbulkan oleh *top down strategy*, maka *bottom up strategy* menjadi pilihan yang strategis untuk mengefektifkan perencanaan pembangunan hingga pelaksanaan pembangunan.”

Sejalan dengan pendapat ahli tersebut di atas, pemerintah dalam menjalankan tugas dan aktivitasnya sesuai dengan dengan Undang-Undang yang berlaku dan berkewajiban untuk selalu memberikan bimbingan, pengarahan, pembinaan dan bantuan pada masyarakat sesuai kemampuan yang tersedia dengan disertai pengawasan sehingga setiap bantuan dapat berjalan dengan baik dan memiliki fungsi yang dapat di rasakan oleh masyarakat selaku penerima bantuan, oleh karena itu masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan desa selalu dituntut peran sertanya dalam perencanaan, pelaksanaan dan penerima manfaat dari pembangunan yang dilaksanakan tersebut. Selanjutnya bahwa pembangunan desa merupakan bagian yang memiliki keterkaitan dengan pembangunan nasional, dengan demikian bahwa pembangunan desa juga harus menjadi perhatian yang serius bagi seluruh lapisan masyarakat mengingat bahwa pemerintahan desa merupakan pemerintahan terendah dibawah pemerintah Kecamatan serta bersentuhan langsung dengan masyarakat, dengan demikian bahwa partisipasi masyarakat harus dibuat saluran dari pemerintah untuk memungkinkan masyarakat berpartisipasi.

Sugihartono (2003 : 86) mengemukakan: “Perencanaan pembangunan partisipatif dapat diartikan sebagai suatu sistem perencanaan pembangunan yang dilakukan secara sadar dan sistematis yang dilakukan oleh masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan.” Dengan demikian bahwa perubahan pembangunan merupakan seperangkat usaha yang terarah dan terencana menuju pada tahap modern yang dianggap lebih baik, oleh karena itu perubahan pada arah yang lebih baik wajib direncanakan terlebih dahulu oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga keterlibatan masyarakat sangat diperlukan. Pusic Sebagaimana dikutip oleh Adi (2001: 121) menyatakan bahwa perencanaan pembangunan tanpa memperhatikan partisipasi masyarakat akan menjadi perencanaan di atas kertas. Berdasarkan pandangannya, partisipasi atau keterlibatan warga masyarakat dalam pembangunan dilihat dari 2 (dua) hal yaitu: (a) Partisipasi dalam perencanaan. Segi positif dari partisipasi dalam perencanaan adalah program-program pembangunan yang telah direncanakan bersama sedangkan segi negatifnya adalah adanya kemungkinan tidak dapat dihindari pertentangan antar kelompok dalam masyarakat yang dapat menunda atau bahkan menghambat tercapainya keputusan bersama. Disini dapat ditambahkan bahwa partisipasi secara langsung dalam perencanaan hanya dapat dilaksanakan dalam masyarakat kecil, sedangkan untuk masyarakat yang besar sukar dilakukan namun dapat dilakukan dengan sistem perwakilan. Masalah yang perlu dikaji adalah apakah yang duduk dalam perwakilan benar-benar mewakili warga masyarakat. (b) Partisipasi dalam pelaksanaan. Segi positif dari partisipasi dalam pelaksanaan adalah bahwa bagian terbesar dari program (penilaian kebutuhan dan perencanaan program) telah selesai dikerjakan. Tetapi segi negatifnya adalah kecenderungan menjadikan warga sebagai obyek pembangunan, dimana warga hanya dijadikan pelaksana pembangunan tanpa didorong untuk mengerti dan menyadari permasalahan yang mereka hadapi dan tanpa ditimbulkan keinginan untuk mengatasi masalah.

Berdasarkan apa yang dikemukakan di atas, bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan jelas sangat dibutuhkan, sebab tidak mungkin secara individu seorang pemimpin dapat melaksanakan pembangunan tanpa dukungan orang lain, tetapi kelemahan partisipasi masyarakat bahwa pertentangan antar kelompok dan antar individu tidak dapat dihindarkan sehingga dapat menunda pelaksanaan pembangunan. Namun demikian yang lebih penting walaupun ada pertentangan maupun perdebatan tetapi semuanya berusaha mencari solusi yang terbaik bukan mencari kelemahan antar individu maupun antar kelompok dalam masyarakat, jadi dalam partisipasi yang penting diambil sari manfaatnya yaitu kebersamaan. Menurut Sanit (dalam Suryono, 2001:32) menjelaskan bahwa, "Pembangunan dimulai dari pelibatan masyarakat. Ada beberapa keuntungan ketika masyarakat dilibatkan dalam perencanaan pembangunan, yaitu, Pertama, pembangunan akan berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Artinya bahwa, jika masyarakat dilibatkan dalam perencanaan pembangunan, maka akan tercipta kontrol terhadap pembangunan tersebut. Kedua, pembangunan yang berorientasi pada masyarakat akan menciptakan stabilitas politik." Jadi dengan demikian keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan berdampak pada peningkatan pertanggungjawaban seluruh masyarakat, oleh karena itu masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan, sehingga bisa menjadi kontrol terhadap pembangunan yang sedang terjadi.

Todaro (2000:20), mendefinisikan bahwa, "Pembangunan merupakan suatu proses multi dimensial yang meliputi perubahan-perubahan struktursosial, sikap masyarakat, lembaga-lembaga nasional, sekaligus peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan." Dengan demikian sudah menjadi sesuatu yang wajar masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan, sebab tujuan pembangunan adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat secara ekonomi serta mengurangi kesenjangan antara masyarakat miskin dan kaum kaya atau pemilik modal terlebih

pembangunan dapat memberantas kemiskinan dan mengurangi pengangguran. Bertitik tolak dari uraian di atas sebelumnya bahwa partisipasi dalam pemanfaatan hasil-hasil pembangunan desa dapat diwujudkan dengan peran serta masyarakat dalam memanfaatkan hasil-hasil pembangunan desa dan keikutsertaan masyarakat dalam memelihara dan mempertahankan serta meningkatkan hasil-hasil pembangunan desa.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, Mardikanto dkk (2012 : 45) menjelaskan bahwa, "Partisipasi/peran serta pada dasarnya merupakan suatu bentuk keterlibatan dan keikutsertaan secara aktif dan sukarela, baik karena alasan intrinsik maupun ekstrinsik dalam keseluruhan proses kegiatan pembangunan yang mencakup pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian (pemantauan, evaluasi, pengawasan), serta pemanfaatan hasil kegiatan yang di capai. Menurut Histiraludin sebagaimana dikutip oleh Handayani(2006:39-40) bahwa, "Partisipasi lebih pada alat sehingga di maknai partisipasi sebagai keterlibatan masyarakat secara aktif dalam keseluruhan proses kegiatan, sebagai media penumbuhan kohesifitas antara masyarakat, masyarakat dengan pemerintah juga menggali tumbuhnya rasa memiliki dan tanggungjawab pada program yang dilakukan." Selanjutnya bahwa masyarakat juga termasuk dalam konteks pengawasan kinerja Kepala Desa termasuk juga pengawasan dalam pengelolaan dana desa, seperti yang terdapat dalam pasal 68 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa bahwa masyarakat berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Partisipasi dalam tahap pengawasan yang dimaksud adalah partisipasi pengawasan yang dilakukan oleh wargamasyarakat yang disampaikan secara lisan atau tertulis kepada aparatur pemerintah desa yang berkepentingan berupa sumbangan fikiran, saran, gagasan, pendapat atau keluhan pengaduan yang bersifat

membangun yang disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media. Dengan demikian bahwa pengawasan masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan desa karena dapat menjadi acuan Kepala Desa dalam melaksanakan tugas sehingga menjadi efektif dan efisien tanpa adanya penyimpangan maupun pemborosan dalam penggunaan anggaran sehingga dana yang dipergunakan efektif untuk pelaksanaan pembangunan desa. Faktor pendorong adalah yang faktor yang bersifat positif mempengaruhi masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan. Menurut Slamet (Nurbaiti, 2017:227), kemauan yaitu adanya sesuatu yang mendorong atau menumbuhkan minat dan sikap mereka untuk termotivasi berpartisipasi, seperti adanya manfaat yang dapat dirasakan atas partisipasinya tersebut. Proses partisipasi masyarakat dapat menjadi pendorong peningkatan keikutsertaan masyarakat dalam merumuskan hal-hal penting dan signifikan yang memengaruhi hidup dan kehidupan masyarakat. Namun demikian ada beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi. Menurut Sumaryadi (2010 : 67) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat yaitu : (1) Kesiediaan suatu komunitas untuk menerima pemberdayaan bergantung pada situasi yang dihadapinya.(2) Pemikiran bahwa pemberdayaan tidak untuk semua orang dan adanya persepsi dari pemegang kekuasaan dalam komunitas tersebut bahwa pemberdayaan dapat mengorbankan diri mereka sendiri. (3) Ketergantungan adalah budaya, dimana masyarakat sudah terbiasa berada dalam hirarkhi birokrasi dan kontrol manajemen yang tegas sehingga membuat mereka terpola dalam berpikir dan berbuat dalam rutinitas. (4) Dorongan dari para pemimpin setiap komunitas untuk tidak mau melepaskan kekuasaannya, karena inti dari pemberdayaan adalah berupa pelepasan sebagian kewenangan untuk diserahkan kepada masyarakat sendiri. (5) Adanya batas pemberdayaan, terutama terkait dengan siklus pemberdayaan yang membutuhkan waktu relatif lama dimana pada sisi yang lain kemampuan dan motivasi setiap orang berbeda-beda. (6) Adanya kepercayaan dari para pemimpin

komunitas untuk mengembangkan pemberdayaan komunitasnya. (7) Pemberdayaan tidak kondusif bagi perubahan yang cepat. (8) Pemberdayaan membutuhkan dukungan sumber daya (*resource*) yang besar, baik dari segi pembiayaan maupun waktu.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, bahwa partisipasi dapat dipengaruhi oleh kebudayaan serta pemikiran yang beranggapan bahwa partisipasi itu dapat mengorbankan diri sendiri. Selain itu pemimpin yang tidak mau melepaskan kekuasaannya dapat menghambat partisipasi, namun di samping adanya penghambat terdapat juga pendorong partisipasi untuk komunitasnya serta adanya kepercayaan pemimpin pada masyarakat yang dipimpinya untuk mengembangkan pemberdayaan untuk masyarakat itu sendiri (komunitasnya). Dengan demikian pemberdayaan memerlukan dukungan seluruh lapisan masyarakat serta sumber daya yang besar, baik dari segi dana maupun waktu yang digunakan dalam melaksanakan partisipasi dalam rangka pengembangan pembangunan desa bagi masyarakat di pedesaan.

Thoha (2001 : 180) mengungkapkan pendapatnya mengenai motivasi sebagai berikut: Perilaku manusia itu hakikatnya adalah berorientasi pada tujuan dengan kata lain bahwa perilaku seseorang itu pada umumnya dirangsang oleh keinginan untuk mencapai beberapa tujuan. Satuan dasar dari setiap perilaku adalah kegiatan. Sehingga dengan demikian semua perilaku itu adalah serangkaian aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan. Dari pendapat para ahli tersebut dapat di simpulkan bahwa motivasi adalah dorongan atau rangsangan yang timbul pada diri seseorang, baik secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan suatu kegiatan secara bersama-sama serta adanya keterlibatan masyarakat untuk mencapai suatu tujuan. Motivasi masyarakat dalam berpartisipasi semata-mata untuk kemajuan bersama dengan semangat kerja yang tinggi, maka seluruh pekerjaan akan dikerjakan dengan sebaik mungkin dan dalam waktu yang cepat, sehingga tujuan pekerjaan yang telah ditetapkan diharapkan akan dapat tercapai, selain itu bahwa partisipasi masyarakat

menempatkan masyarakat sebagai pengawas dan kontrol sosial terhadap pelaksanaan pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan dengan harapan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien tanpa adanya penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Menurut Sunarti (dalam Suryawan 2004:29), menjelaskan tentang hambatan-hambatan yang dapat ditemui dalam pelaksanaan partisipasi oleh masyarakat yang bersangkutan, antara lain adalah sebagai berikut: (1) Kemiskinan. hambatan ini dapat merupakan faktor yang mendasar karena dengan kemiskinan seseorang akan berpikir lebih banyak untuk melakukan sesuatu yang mungkin saja tidak menguntungkan bagi diri atau kelompoknya; (2) Pola masyarakat yang heterogen. Hal tersebut akan mengakibatkan timbulnya persaingan dan prasangka dalam sistem masyarakat yang ada; (3) Sistem birokrasi. faktor ini dapat dijumpai di lingkungan pemerintahan. seringkali birokrasi yang ada melampaui standar serta terpaku pada prosedur formal yang kompleks. (<https://2frameit.blogspot.com/2013/05/hambatan-dalam-partisipasi-masyarakat.html>)

Berdasarkan pendapat tersebut bahwa hambatan pelaksanaan partisipasi masyarakat adalah kemiskinan, dengan ketidakberdayaan tersebut sehingga masyarakat mengalami kesulitan untuk berpartisipasi terutama partisipasi berbentuk dana sedangkan partisipasi bentuk tenaga tidak masalah akan tetapi tetap menjadi bahan pertimbangan untuk berpartisipasi dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan khususnya masyarakat desa. Kendala yang akan dihadapi dengan pendekatan partisipasi menurut Parwoto (dalam Sunarti, 2003:44) adalah: (1) Diperlukan perubahan sikap pemerintah dan para profesional dari penyedia (*provider*) menjadi enabler, hal ini seringkali membutuhkan waktu yang lama; (2) Tata administrasi pada suatu pembangunan seringkali kurang mendukung pendekatan partisipatif (pelibatan masyarakat); (3) Perlu unsur pendamping yang profesional untuk mengisi kelemahan kaum awam (masyarakat) dalam pelaksanaan suatu program pembangunan. Menurut Eugen C. Erickson sebagaimana dikutip

oleh Suparjan dan Hemptri Suyatno(2003:58-59), bahwa, "Partisipasi pada dasarnya mencakup dua bagian yaitu internal dan eksternal. Sementara partisipasi dalam arti eksternal terkait dengan bagaimana individu melibatkan diri dengan komunitas luar." Sesuai dengan pendapat di atas, bahwa partisipasi internal merupakan partisipasi yang dilaksanakan dalam kelompok masyarakat dipedesaan sementara partisipasi eksternal adalah partisipasi yang ada diluar masyarakat desa misalnya partisipasi masyarakat dilingkungan perusahaan, untuk melaksanakan partisipasi masyarakat perlu ada pihak pendamping untuk mengarahkan masyarakat.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pembangunan desa modal utamanya adalah partisipasi masyarakat, tanpa adanya partisipasi masyarakat maka mengalami kesulitan dalam pelaksanaan pembangunan desa yang dimaksud. Selain itu bahwa pembangunan desa dilaksanakan dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat desa itu sendiri, sehingga pelaksanaannya mengutamakan swadaya gotong - royong masyarakat. Sifat gotong - royong mencerminkan sikap kekeluargaan dalam masyarakat desa yang senasib dan sepenanggungan. Sejalan dengan hal tersebut bahwa pelaksanaan pembangunan direncanakan sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa baik itu kebutuhan yang mendasar maupun kebutuhan jangka panjang. Hal ini menunjukkan bahwa adanya keterlibatan masyarakat, dan saling tolong-menolong antar sesama warga masyarakat, selain itu dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan desa, walaupun tidak seluruh masyarakat secara langsung memberikan saran dan masukan tetapi melalui BPD sebagai perwakilan kewilayahan. Selain itu perencanaan yang telah ditentukan menjadi program pembangunan desa karena perencanaan tersebut sudah sesuai dengan tuntutan dan keinginan masyarakat, oleh karena itu titik tolak perencanaan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat ditingkat desa, jadi landasan pelaksanaan

pembangunan adalah didasarkan pada hasil musyawarah dan kesepakatan bersama yang dianggap paling baik untuk masyarakat.

Selanjutnya bahwa bentuk partisipasi masyarakat yang dominan adalah partisipasi dalam bentuk tenaga dan partisipasi dalam bentuk pikiran dengan keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, masyarakat terlibat bukan hanya ikut dalam perencanaan tetapi ikut juga dalam pelaksanaannya walaupun sebagian kecil, sebab tidak ada artinya hanya ikut perencanaan tetapi tidak pernah ikut dalam pelaksanaannya. Jadi dengan demikian dalam proses pembangunan tidak ada artinya perencanaan jika tidak diimbangi dengan pelaksanaan, justru yang paling penting adalah wujud pelaksanaannya tanpa mengabaikan proses perencanaan. Ini berarti perencanaan sebagai patokan dan landasan dalam pelaksanaan pembangunan terutama pembangunan desa. Pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan prinsip otonomi desa artinya pembangunan di desa dapat saja dilaksanakan dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemampuan keuangan desa serta pendapatan asli desa (PADes). Namun demikian pembangunan desa tidak hanya berdasarkan partisipasi dan swadaya tetapi mendapat subsidi dari pemerintah melalui dana alokasi umum secara langsung dari pemerintah pusat yaitu alokasi dana desa (ADD), tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat desa. Dengan demikian dana yang sudah dialokasikan untuk pembangunan tersebut digunakan untuk sebaik-baiknya bagi kemakmuran masyarakat, sehingga Kepala Desa dan perangkatnya menjadi tumpuan dan harapan masyarakat untuk menggunakannya secara efektif dan efisien serta terhindar dari pemborosan dan penyelewengan dalam menggunakan anggaran tersebut.

Dengan demikian keterlibatan masyarakat dalam perencanaan sangat penting sekali untuk menghasilkan berbagai pemikiran dalam rangka memberikan masukan pada pemerintah desa agar memprioritaskan kebutuhan mendasar menjadi perencanaan yang dominan dan utama bagi kesejahteraan masyarakat desa. Sebagaimana

diketahui bahwa semua kegiatan dimulai dengan perencanaan, demikian juga partisipasi, seiring dengan pelaksanaan pembangunan maka terlebih dahulu direncanakan, dengan adanya perencanaan pembangunan maka masyarakat harus dilibatkan, sebagaimana telah dipaparkan di atas bahwa modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan desa adalah partisipasi dan swadaya masyarakat. Dengan demikian peran serta masyarakat sangat penting dalam perencanaan pembangunan sampai pemeliharaan hasil-hasil pembangunan, selain itu tujuan adanya partisipasi masyarakat agar masyarakat merasa memiliki pembangunan yang telah dan akan dilaksanakan walaupun partisipasi masyarakat belum maksimal tetapi partisipasi masyarakat sudah ada, masyarakat yang tidak sempat gotong-royong disebabkan oleh kesibukan sebagai petani sehingga tidak dapat maksimal, namun demikian partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dilaksanakan musyawarah dan mufakat.

Selanjutnya bahwa pelaksanaan pembangunan memprioritaskan kebutuhan masyarakat yang mendasar yang menjadi fondasi dalam meningkatkan roda ekonomi masyarakat, sehingga membentuk kesadaran masyarakat untuk aktif dan terlibat dalam kegiatan yang dilaksanakan di desa. Namun demikian partisipasi masyarakat tidak akan tumbuh dengan baik tanpa adanya motivasi dalam membimbing dan membina masyarakat sehingga pemberdayaan masyarakat juga penting dalam keberlangsungan peningkatan ekonomi masyarakat. Selain itu sebagai pemimpin masyarakat harus mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terutama dari aspek pelaksanaan pembangunan dengan menggunakan anggaran secara terbuka dan transparan, dengan adanya keterbukaan masyarakat mengetahui anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan pembangunan, walaupun di sadari bahwa tidak semua anggaran diketahui oleh masyarakat tetapi yang lebih penting adalah penggunaan anggaran dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan tentunya seimbang dengan dana yang dimiliki dan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan dimaksud. Selanjutnya tahap-tahap partisipasi

yang melibatkan masyarakat adalah partisipasi dalam perencanaan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam tahap pemanfaatan hasil pembangunan dan partisipasi dalam tahap pengawasan pembangunan. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, ini berarti bahwa pelaksanaan maupun perencanaan melibatkan partisipasi masyarakat, dengan demikian kegiatan yang dilaksanakan di desa masyarakat mengetahuinya walaupun tidak semua masyarakat mengetahui, hal tersebut di sebabkan tidak semua masyarakat bisa aktif dalam berpartisipasi terhadap perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan desa.

Dengan demikian bahwa partisipasi merupakan kegiatan masyarakat yang menginginkan adanya perubahan ke arah yang lebih baik dari sebelumnya sesuai dengan tuntutan dan tujuan pembangunan. Selain itu bahwa kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan perlu ditingkatkan dengan berbagai pendekatan, baik pendekatan kekeluargaan maupun pendekatan kolektif kolegal yang dapat memberikan arahan yang menggugah keinginan masyarakat dalam berpartisipasi demi kemajuan desa itu sendiri, sebab pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh desa yang bersangkutan. Jadi dengan demikian Aparatur Desa wajib menggali dan memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, sebab sikap kekeluargaan dan gotong-royong dalam menyelesaikan bekerja sama harus menjadi yang terdepan dalam pelaksanaan pembangunan desa. Salah satu faktor yang mendorong masyarakat untuk berpartisipasi adalah kebutuhan masyarakat itu sendiri, kebutuhan yang dimaksud tidak dapat dipenuhi secara pribadi sehingga memerlukan keikutsertaan semua lapisan masyarakat seperti infrastruktur jalan dan jembatan, hal ini tidak mungkin dapat dibangun oleh individu melainkan dapat dilakukan secara bersama-sama sehingga membutuhkan seluruh komponen masyarakat yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat, artinya komponen tersebut harus saling bahu-membahu untuk mendukung tujuan masyarakat dalam memenuhi

kebutuhan yang tidak dapat dilaksanakan secara individu.

Dengan demikian hal ini membuat masyarakat untuk berpartisipasi dalam mencapai kebutuhan tersebut. Jadi dengan demikian yang mendorong partisipasi masyarakat adalah kebutuhan baik yang mendasar maupun tidak, tetapi hal ini kadang-kadang tidak di sadari masyarakat khususnya masyarakat yang tidak mau terlibat dalam pelaksanaan pembangunan. Selanjutnya selain kebutuhan yang mendorong munculnya partisipasi adalah adanya kesadaran masyarakat tersebut karena ingin bersama-sama dengan masyarakat yang lain untuk pelaksanaan pembangunan dan sadar bahwa pembangunan tidak dapat dilaksanakan seorang diri atau secara pribadi. Selanjutnya bahwa faktor penghambat partisipasi adalah ketidaktahuan masyarakat tentang pentingnya partisipasi karena beranggapan bahwa pelaksanaan pembangunan anggarannya sudah cukup untuk melaksanakan pembangunan oleh karena itu partisipasi untuk masyarakat yang sempat saja tidak dipaksakan untuk mengikuti kegiatan perencanaan pembangunan maupun pelaksanaan, oleh karena itu pelaksanaan dan perencanaan pembangunan diperlukan sosialisasi sehingga masyarakat mengetahui kegiatan pembangunan. Dengan demikian tujuan dapat memunculkan kebersamaan sehingga perencanaan pembangunan diakomodir mencakup tujuan masyarakat secara keseluruhan, dengan mengetahui tujuannya masyarakat secara sadar dapat melibatkan diri untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, oleh karena itu perencanaan pembangunan wajib diketahui oleh masyarakat, dengan demikian bahwa pembangunan dilaksanakan secara sadar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan maupun ekonomi masyarakat, tidak dapat dimungkiri bahwa adanya pembangunan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat menjadi lebih baik, walaupun memiliki dampak bagi masyarakat yang sulit untuk menerima perubahan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa sangat penting sebab partisipasi merupakan modal dasar pelaksanaan pembangunan, oleh karena itu seluruh warga masyarakat wajib ikut serta dalam usaha pelaksanaan pembangunan khususnya pembangunan desa. Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk partisipasi masyarakat yang dominan adalah swadaya gotong-royong atau bentuk tenaga sementara partisipasi dalam bentuk ide-ide masih belum maksimal. Namun demikian partisipasi masyarakat dalam perencanaan sampai memanfaatkan dan memelihara hasil-hasil pembangunan tetapi tidak semua masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan. Faktor yang mendorong masyarakat untuk berpartisipasi adalah keinginan untuk mencapai tujuan serta kesadaran untuk melaksanakan pembangunan namun demikian terdapat penghambat dalam penerapan partisipasi diantaranya adalah kurangnya kesadaran akan pentingnya partisipasi, selain itu disebabkan kurang optimalnya sosialisasi dalam pelaksanaan pembangunan. Saran yang dapat diajukan adalah Aparatur desa hendaknya memberikan motivasi pada masyarakat dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan desa, selain itu sosialisasi sebaiknya dilaksanakan dan ditingkatkan agar masyarakat mengetahui pembangunan yang dilaksanakan pemerintahan desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto. 2001. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas (Pengantar Pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis)*. Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Adi, Isbandi Rukminto. 2007. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Jakarta : FISIP Universitas Indonesia Press
- Davis, Keith. 2000. *Perilaku Dalam Organisasi*, Edisi ketujuh. Jakarta: Erlangga.
- Gitosudarmo dan Sudita. 2000. *Perilaku Organisasi*. Yogyakarta: BPFE.
- Handayani, Suci. 2006. *Perlibatan Masyarakat Marginal Dalam Perencanaan dan Penganggaran Partisipasi*, (Cetakan Pertama). Surakarta : Kompip
- Hasibuan, S.P.M. 2001. *Organisasi dan Motivasi*. Cet. 2. Jakarta: Bumi Aksara.
- Koentjaningrat. 1987. *Masalah - masalah Pembangunan. ( Bunga Rampai Antropologi Terapan)*. Jakarta : LP3ES
- Mardikanto, T dan Soebianto, P. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung : Alfa Beta.
- Nawawi, Hadari. 2007. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,
- Narbuko dan Abu Achmadi, Kholid,. 2004. *Metodologi Penelitian: Memberi Bekal Teoritis pada mahasiswa Tentang Metodologi Penelitian: Memberi Bekal Teoritis pada Mahasiswa Tentang Metodologi Penelitian Serta Diharapkan dapat Melaksanakan Penelitian dengan langkah-langkah yang benar*. Jakarta: PT. Bukti Aksara.
- Ndraha. 2007. *Ilmu Pemerintahan, Bidang Kajian Utama (DKU), Jilid I-II-III-IV-V Ilmu Pemerintahan Kerjasama*. Bandung : IIPUNPAD
- Nurbaiti, S. Robiah, dan Aziz Nur Bambang. (2019). *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility (CSR)*. Jurnal Fisip Undip: Proceeding Biology Education Conference. Vol. 14 (1): 224-228.
- Simanjuntak B, dan Pasaribu L. 2006. *Sosiologi Pembangunan*. Tarsito: Bandung.

- Suparjan dan HempriSuyatno. 2003. *Pengembangan Masyarakat dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Sugihartono, A.D. 2003. *Perencanaan Pembangunan Partisipatif Kota Solo Pendekatan Pembangunan Ngewongke Uwong*. Solo : IPGI Solo
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Suryono, Agus. 2001. *Teori dan Isu Pembangunan*. Malang: Universitas Malang Press.
- Sunarti. 2003. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Perumahan secara Kelompok*. Jurnal Tata Loka. Semarang: Planologi UNDIP.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra
- Sumaryadi, I Nyoman. 2010. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : Citra Utama.
- Soetrisno, Loekman.2000. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta: Kanisius.
- Solekhan, moch. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang Jatim : Setara Press.
- Todaro, Michael P. 2000. *Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga
- Toha, M. 2001. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar Aplikasinya*. Jakarta: CV. Rajawali
- Tjokrowinoto, Moeljarto. 2001. *Pembangunan, dilema dan Tantangan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Winardi. 2001. *Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Manajemen*. Bandung: Alumni.
- Peraturan Perundangan :
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*.